

## ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI DIGITALISASI PERBANKAN (STUDI PADA APLIKASI PELAYANAN “PEMDA ONLINE” BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG)

Rendito<sup>1</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Intan Fitri Meutia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung  
Rendito567@gmail.com

### Abstrak

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*, yakni para pemegang saham, dewan komisaris, pemerintah, masyarakat dan karyawan dalam memenuhi hak - hak dan kewajiban perusahaan dalam melindungi kepentingan para *stakeholder* yang berlandaskan atas nilai - nilai korporasi perusahaan yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan GCG, indikasi GCG dalam mendukung transformasi digitalisasi perbankan dalam meningkatkan kualitas inovasi pelayanan melalui aplikasi pelayanan pemda online sebagai aplikasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mengenai kendala dalam pelaksanaan GCG dalam mendukung transformasi digitalisasi melalui aplikasi pemda online pada Bank Pembangunan Daerah Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG pada Bank Pembangunan Daerah Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan atas: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kesetaraan, Namun pada pelaksanaannya belum dilaksanakan secara baik, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang diantaranya adalah : belum terpenuhinya kepengurusan inti Bank Pembangunan Daerah Lampung dan terbatasnya jangkauan teknologi informasi.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance, Stakeholders, Transformasi Digitalisasi Perbankan*

### Abstract

*Good Corporate Governance is a set of rules that organize the relationship between a company and its stakeholders that are, the shareholders, commissioner councils, the government, the community and employees in fulfilling the rights and obligations of the company in protecting the interests of stakeholders based on sound corporate values. This study aims to obtain an overview and analysis of the implementation of GCG, indications of GCG in supporting the transformation of banking digitalization in improving the quality of service innovation through the application of online local government services as an application that supports transparency and accountability in regional financial management and regarding the obstacles in implementing GCG in supporting digitalization transformation through online local government at the Lampung Regional Development Bank. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of GCG at the Lampung Regional Development Bank has been carried out in accordance with the principles of GCG based on: transparency, accountability, responsibility, independence and equality, but the implementation has not been carried out properly, due to several prevent factors among which is: not yet fulfilled the core management of the Lampung Regional Development Bank and the limited network of IT*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Stakeholders, Banking Digitazion transformation*

## I. PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sebab jika komponen pelayanan tidak

dikelola dengan baik, maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak tidak baik. Oleh sebab itu, perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dalam (Hardiansyah 2018 : 14) pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan penyelenggara pelayanan tidak hanya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat tetapi dapat juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas dalam memberikan pelayanan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan tertentu yang sebagian atau seluruh dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 14 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan seluruh Pemerintahan Daerah untuk segera mengelola sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sektor perbankan merupakan faktor utama yang mampu menunjang perekonomian di suatu Negara maupun Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke sektor *rill* untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sehingga bank telah menjadi lembaga yang mempengaruhi perekonomian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa bank umum yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) diharuskan untuk dapat melaksanakan prinsip - prinsip

pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Sedermayanti (2012:50) menjelaskan awal mula pelaksanaan GCG terjadi di Negara Indonesia pada tahun 1998 disebabkan saat itu Negara Indonesia mengalami krisis moneter yang mengganggu tata kelola perusahaan. Dampak dari terjadinya krisis moneter tidak hanya dialami oleh Negara Indonesia tetapi seluruh bagian di Negara Asia Tenggara. Menurut Cadbury dalam Rusdianto, Dkk (2019:1) mengungkap adanya *corporate governance* akan membawa pada implikasi dari sisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, setidaknya dengan diterapkannya *corporate governance* tujuan perusahaan akan semakin jelas dan terciptanya mekanisme dalam penilaian akuntabilitas dan transparansi akan menumbuhkan keadilan melalui sisi transparansi dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan tanggung jawabnya terhadap para *stakeholder* (para pemangku kepentingan)

*Corporate Governance* mengacu pada cara di mana perusahaan diatur dan untuk tujuan apa. Hal ini untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki akuntabilitas dan siapa yang membuat keputusan. Pada dasarnya ini memungkinkan manajemen dan dewan untuk menangani lebih efektif tantangan manajemen perusahaan. (Harford et al., 2012) Tata kelola perusahaan memastikan bahwa bisnis memiliki proses pengambilan keputusan yang tepat pada dasarnya semua pemangku kepentingan (pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat dan pemerintah) (Guiso et al., 2015)

Berkaitan dengan pemberian pelayanan yang bergerak di bidang jasa pelayanan perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan bank milik Pemerintah Daerah Lampung yang bertujuan untuk mengelola keuangan kas daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan membantu mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah Lampung. Penerapan tata kelola perusahaan di seluruh organ bank akan menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan

*stakeholder* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan nilai – nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan.

Penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas – tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal, penerapan manajemen resiko dan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Rencana strategis BPD Lampung periode 2018 – 2020 adalah mengutamakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank serta terhindarnya proses kerja dari *conflict of interest*. (Laporan Tata Kelola Perusahaan BPD Lampung 2018 : 53)

Menurut Fitrianti dalam Hardiansyah (2018 : 21) mengatakan bahwa persaingan dunia usaha perbankan khususnya dalam persaingan pemberian pelayanan perlu menjadi perhatian dalam manajemen perusahaan perbankan. Pelaksanaan dari inovasi perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha yang semakin ketat, Manajemen Bank Pembangunan Daerah Lampung melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi digitalisasi.

Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai salah satu bank yang turut mendukung sektor ekonomi daerah Lampung pada khususnya, Berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial intermediary*) dengan menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah Lampung diberikan kepercayaan dalam mengelola dana-dana milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai bank umum memiliki peranan sentral dalam bertanggung jawab mengatur keuangan kas daerah. Dalam mendukung pelayanan transparansi keuangan daerah. Bank Pembangunan Daerah Lampung mengeluarkan sebuah inovasi produk pelayanan berbasis transformasi digitalisasi

di dalam pengelolaan keuangan kas daerah. Salah satu inovasi pelayanan digitalisasi tersebut ditandai dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Bank Pembangunan Daerah Lampung melalui peluncuran aplikasi digitalisasi yang dinamakan Pemerintah Daerah Online (Pemda Online). Aplikasi ini secara resmi direalisasikan pada tanggal 4 oktober 2018.

Pemda online merupakan aplikasi transaksi non tunai guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi dan mencegah transaksi ilegal (korupsi) dengan bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*Velocity of money*) dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan kas daerah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Suryani dalam Sumanjoyo, Simon dan Dedy Hermawan (2018 : 23) Inovasi pelayanan dalam konsep luas tidak hanya dapat berupa ide, cara – cara ataupun objek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi pelayanan sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Menurut Rosenfeld dalam Sumanjoyo, Simon dan Dedy Hermawan (2018 : 132) Kata inovasi pelayanan dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

Karakteristik inovasi pelayanan menurut M. Roggers dalam Rostyaningsih, Dkk (2012 : 12) meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)
- b. Kompatibilitas (*Compatibility*),
- c. Kerumitan (*Complexity*)
- d. Kemampuan diuji cobakan (*Triability*)

- e. Kemampuan untuk diamati (*Observability*)

Kualitas pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan di dalam memberikan pelayanan. Istilah kualitas pelayanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Beberapa contoh pengertian kualitas pelayanan menurut Tjiptono dalam Hardiansyah (2018 : 35) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang diberlakukan dalam memberikan pelayanan yang baik, Sementara itu menurut Ibrahim dalam Hardiansyah (2011:40) kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan tersebut.

#### **Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan BUMN / BUMD Di Indonesia**

Menurut Sedarmayanti (2012 : 50) awal mulanya istilah *Good Corporate Governance* (GCG) dikenal di Indonesia bertepatan pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Saat itu pengelolaan perusahaan tidak dikelola secara baik dan mengabaikan tanggung jawab, regulasi dan aturan Perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG : 2006) Pemerintah Indonesia mulai menandatangani nota kesepakatan (*Letter of interest*) untuk segera membentuk komite audit pada Tahun 1998 sebagai awal dari pelaksanaan GCG di yang dikenalkan kepada perusahaan – perusahaan publik di Indonesia.

Menurut Sutedi (2011:18) *Good Corporate Governance* adalah suatu proses yang digunakan oleh organ Perusahaan Terbatas (PT) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan menumbuhkan sisi akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*, dengan berlandaskan atas peraturan Perundang-undangan dan nilai - nilai etika bisnis, Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif.

Pelaksanaan GCG pada BUMN / BUMD ditandai dengan adanya penerapan dari prinsip - prinsip GCG, Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tentang *Good Corporate Governance*, meliputi beberapa hal, yaitu :

- a. *Transparansi (Transparency)*  
Keterbukaan di dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*  
Kejelasan fungsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebuah perusahaan kepada para pemangku kepentingan.
- c. *Responsibilitas (Responsibility)*  
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Kemandirian (Independency)*  
Keadaan yang dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. *Kesetaraan (Fairness)*  
Memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GCG dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah (BUMN/BUMD) agar terciptanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, menumbuhkan sisi keadilan dan menjaga keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh perusahaan melalui bentuk tanggung jawab kepada para *stakeholder*. GCG dipandangan sebagai sebuah solusi dalam melakukan perbaikan sistem dari manajemen operasional perusahaan kearah yang lebih baik.

Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan bank milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bergerak pada sektor pelayanan perbankan yang bertugas sebagai pengelola keuangan kas daerah. Bank

Lampung menjadi salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaksanakan penerapan dari GCG berdasarkan himbauan Pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Dalam pelaksanaan GCG Bank Pembangunan Daerah Lampung berupaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dengan menerapkan kelima unsur prinsip GCG yakni: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, Kesetaraan. Kelima prinsip ini diterapkan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan prinsip GCG sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung.

### Transformasi Digitalisasi Perbankan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK/3/2018 tentang Pelaksanaan Digitalisasi Perbankan mengungkapkan bahwa salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, adalah dengan melakukan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal untuk mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena itu, Bank perlu memberikan kemudahan dalam akses pelayanan perbankan berbasis teknologi informasi tanpa batasan tempat dan waktu untuk mendorong pengelolaan keuangan nasabah dan daerah yang lebih baik didasarkan atas inovasi pelayanan dan penyelarasan strategi dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendorong industri perbankan bank umum memasuki layanan perbankan digital.

Kemajuan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, sejalan dengan visi dan misi Bank Pembangunan Daerah Lampung, untuk mendukung visi dan misi yang telah diterapkan Bank Pembangunan Daerah Lampung terus berupaya menyesuaikan antara kemajuan digitalisasi dengan produk pelayanan yang mereka luncurkan.

Mengingat peranan tugas dan fungsi Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Provinsi

Lampung. Pemerintah Provinsi bersama - sama dengan Bank Pembangunan Daerah Lampung berupaya untuk melaksanakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai bentuk respon terhadap himbauan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan menggunakan transaksi non tunai. Hal ini telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 917/1867/ SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah/Kab/Kota.

### III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan GCG pada Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Indikasi prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam mendukung transformasi digitalisasi perbankan melalui aplikasi pelayanan "Pemda Online". Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Sugiyono (2016 : 244), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, maka peneliti melakukan pembahasan terkait hasil temuan di lapangan. Tahap ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, serta data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun pembahasan mengenai “Analisis Good Corporate Governance Dalam Transformasi Digitalisasi Perbankan Studi Pada Aplikasi Pelayanan Pemda Online Bank Pembangunan Daerah Lampung” akan dideskripsikan sebagai berikut:

##### **Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN / BUMD DI Indonesia**

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) dalam Chandra (2016 : 395) GCG diperlukan untuk mendorong terjadinya pengelolaan perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu, Negara sebagai regulator dan Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang dijelaskan bahwa bank umum yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) diharuskan untuk dapat melaksanakan prinsip – prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Didasarkan atas peraturan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam mengelola tata kelola perusahaannya didasarkan atas penerapan dari pelaksanaan GCG, Hal ini adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajemen operasional Bank Lampung kepada para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) maupun para pemegang saham.

Rencana strategis BPD Lampung periode 2018-2020 adalah mengutamakan transparansi kondisi keuangan dan non

keuangan bank serta terhindarnya proses kerja dari *conflict of interest* (konflik kepentingan). Penilaian komposit GCG PT Bank Pembangunan Daerah Lampung hingga akhir periode tahun 2018 dan 2019 berada pada peringkat III (3) Komposit bank “Cukup Baik” kondisi ini terpicu oleh belum terpenuhinya komposisi kepengurusan Bank. Peringkat ini mencerminkan bahwa manajemen Bank Lampung telah melakukan penerapan dari GCG.

Menurut Musadieg & Sulistyو dalam Suwandi Imam, Dkk (2018 : 48) pelaksanaan dari GCG didasarkan atas penerapan dari prinsip – prinsip GCG, sebagai berikut :

##### **1. Transparansi**

Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam menjalankan tata kelola perusahaannya memiliki tugas dan fungsi dalam mengedepankan sikap transparansi yang merupakan prinsip pertama dari pelaksanaan GCG. Pelaksanaan dari prinsip transparansi menekankan kepada keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai perusahaan. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Lampung bergerak pada bidang jasa layanan perbankan memiliki tanggung jawab dalam mengedepankan sisi transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang dijalankan. Pelaksanaan dari prinsip transparansi ini ditandai dengan adanya tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Bank Lampung.

Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan dan adanya kemudahan dalam mengakses informasi oleh para pemangku kepentingan. Hal ini ditandai dengan adanya penyediaan website resmi Bank Lampung yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun pemangku kepentingan yang tujuannya adalah untuk memberikan data dan informasi terkait pelaporan kinerja, kondisi internal perusahaan, hubungan kerjasama dan informasi tentang segala bentuk kegiatan yang dijalankan oleh Bank Lampung dalam menjalankan tata kelola perusahaannya. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu perwujudan dari sikap transparansi yang dimana ditandai dengan adanya pengadaan

Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPPS) yang rutin dijalankan setiap akhir tahun, pengadaan dari pelaksanaan rapat ini rutin dilakukan agar dalam pengambilan keputusan yang diambil didasarkan atas keterlibatan dan persetujuan bersama yang diketahui oleh para pemegang saham.

Pelaksanaan pengelolaan website tersebut menunjukkan adanya sikap transparansi yang ditunjukkan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung yang dimana terdapat akses untuk mendapatkan data / informasi terkait kinerja perusahaan Bank Pembangunan Daerah Lampung yang dimulai dari profil perusahaan, hubungan investor, produk, layanan, jaringan, berita dan laporan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Musadied & Sulistyono dalam Suwandi Imam Dkk (2018:48) yang mengungkapkan indikator dasar pelaksanaan GCG adalah prinsip transparansi yang dimana prinsip transparansi ditandai dengan adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh perusahaan demi melindungi kepentingan *stakeholder*.

## 2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan dari tugas dan fungsi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebuah perusahaan kepada *stakeholder* dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Penerapan dari prinsip akuntabilitas ditunjukkan melalui adanya upaya yang dilakukan sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa kinerja organ perusahaan bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Selain itu sikap pertanggungjawaban sebuah perusahaan dapat dilihat dari sisi pertanggungjawabannya dengan memberikan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan kepada divisi audit internal dan lembaga Negara independen seperti OJK dan BI.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung ditandai dengan adanya kejelasan tentang struktur, tugas, tanggung jawab dan peran yang dilaksanakan oleh unit kerja. Upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja organ perusahaan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu

dengan adanya pemeriksaan terhadap masing - masing unit kerja yang dilakukan oleh divisi audit internal dan divisi kepatuhan yang merupakan divisi yang bertugas dalam mengawasi, mengontrol, memberikan teguran apabila ditemukan adanya kinerja karyawan yang tidak efektif dan menurun.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya, ditunjukkan melalui kepatuhan di dalam mempertanggungjawabkan laporan publikasi terkait dengan laporan kinerja perusahaan, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan tentang tata kelola perusahaan dan informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan laporan kinerja perusahaan dan informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan Bank Pembangunan Daerah Lampung.

## 3. Responsibilitas

Prinsip responsibilitas adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan mengacu pada kesesuaian manajemen perusahaan yang berlandaskan atas peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dari prinsip responsibilitas menekankan kepada adanya keselarasan antara penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan operasional perusahaan, Hal ini adalah sebagai bentuk kesadaran perusahaan terhadap pentingnya mempertahankan eksistensi dan citra perusahaan kepada pengguna layanan dan masyarakat yang ditunjukkan melalui adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang bertujuan untuk mengedepankan sikap kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Selain itu sikap responsibilitas menunjukkan adanya aturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan seperti dalam memberikan pelayanan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aturan yang menjadi dasar perusahaan untuk mengatur tentang memelihara lingkungan bisnis yang sehat tanpa adanya konflik kepentingan.

Bank Pembangunan Daerah Lampung secara rutin melaksanakan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial

perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi terhadap peningkatan taraf kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada penyusunan laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah Lampung telah menyesuaikannya dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No : KEP-447BL/2012 dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, Maka laporan keuangan yang dipublikasikan kepada para stakeholder disesuaikan dengan kaidah maupun aturan yang telah berlaku.

#### **4. Kemandirian**

Prinsip kemandirian menekankan kepada suatu keadaan yang dimana sebuah perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi proses pengambilan suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK/03/16 tentang Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam menempatkan komposisi jabatan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, kepengurusan dan kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah Lampung, Hal ini dilakukan untuk mengurangi intervensi (pengaruh) pengambilan suatu keputusan yang didasari oleh kepentingan pribadi.

Profesionalitas pengelolaan pada Bank Pembangunan Daerah Lampung didasarkan atas pelaksanaan, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dilakukan secara baik, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan manajemen perusahaan yang didasari oleh sikap kemandirian, keandalan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja yang

berpengaruh terhadap efektifitas dalam pertanggungjawaban perusahaan kepada para *stakeholder* yang memiliki kepentingan pada Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan didukung oleh kualifikasi pendidikan yang mumpuni dan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Sesuai dengan indikator prinsip GCG kemandirian, Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam pengelolaan perusahaan yang didasarkan atas sikap kemandirian ditunjukkan melalui adanya aturan yang mendasari hubungan anggota keluarga dalam jabatan inti Dewan Komisaris dan Direkrut, Hal ini adalah sebagai upaya dalam mengurangi intervensi pengaruh dan tekanan terhadap kepentingan pribadi .

#### **5. Kesetaraan**

Prinsip kesetaraan adalah upaya suatu perusahaan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang berlandaskan atas keadilan dan kesetaraan yang timbul berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dari prinsip ini ditunjukkan melalui adanya kesempatan yang diberikan perusahaan kepada para *stakeholder* dalam menerima informasi terkait dengan kondisi internal perusahaan seperti pelaporan kinerja, tata kelola perusahaan dan laporan keuangan dengan mengedepankan sikap keterbukaan. Selain di dalam menerima segala bentuk informasi tanpa dibeda-bedakan, sikap dari kesetaraan ini ditandai dengan adanya kesempatan yang diberikan perusahaan kepada *shareholder* (para pemegang saham) dalam memberikan saran, opini, terkait keberlangsungan pengelolaan perusahaan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak yang mereka dapatkan, Lainnya, Sikap dari kesetaraan ini dapat ditunjukkan dengan adanya kesempatan yang sama diberikan oleh perusahaan terhadap semua karyawan dalam pengembangan kompetensi diri, kenaikan jabatan dan penerimaan karyawan yang tidak membedakan nya atas ras, suku, agama, golongan dan gender. Hal ini menunjukkan keadaan yang dimana perusahaan dikelola secara baik dan menyerlaskan hak-hak yang diterima oleh para *shareholder* maupun karyawan yang bekerja dalam perusahaan.

Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam melaksanakan prinsip kesetaraan kepada para *stakeholder* diwujudkan dengan



cara melaksanakan agenda rapat rutin yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan setiap per enam bulan dan di akhir penghujung tahun di bulan desember dengan diikuti oleh para pemegang saham seperti Pemerintah, Pemegang Saham, Dewan Direksi dan keterwakilan para pemegang saham pada Kab/Kota Provinsi Lampung. Pada pelaksanaan rapat tersebut dibahas secara rinci kinerja operasional perusahaan dan hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh lembaga pemeriksaan yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) keterwakilan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu pelaksanaan agenda rutin rapat diartikan sebagai bentuk perwujudan sikap kesetaraan yang dimana pada forum tersebut para pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya berwenang berkesempatan dalam mengemukakan pendapat (opini) mereka yang dapat membangun kemajuan kinerja operasional bank daerah Lampung kedepannya.

Pada aspek penerimaan karyawan, Bank Pembangunan Daerah Lampung didasarkan atas standarisasi kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang disesuaikan dengan jabatan atau posisi yang dibutuhkan. Penerimaan karyawan tidak didasari atas perbedaan dalam hal suku, golongan, budaya, gender dan kondisi fisik lalu memberikan kesempatan terhadap semua karyawan magang/tetap untuk mengikuti seminar dan pelatihan dalam pengembangan kompetensi diri sebagai bentuk perwujudan dalam pemenuhan hak - hak yang didasari atas sikap adil dan wajar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya pada perusahaan milik Pemerintah adalah untuk mengedepankan sisi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja perusahaan untuk menciptakan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dalam melindungi kepentingan perusahaan dan *stakeholders*

### **Indikasi GCG Dalam Mendukung Penerapan Transformasi Digitalisasi Perbankan**

Pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan mekanisme dalam melakukan pengelolaan perusahaan yang berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan etika dalam menjalankan usaha. Pelaksanaan tata kelola perusahaan didasari oleh pelaksanaan dari prinsip-prinsip GCG. Seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kesetaraan. Pelaksanaan dari prinsip GCG dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang melindungi kepentingan para *stakeholder* dalam mendapatkan hak-hak dan tanggung jawab yang mereka peroleh untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dengan tidak merugikan pihak manapun.

Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai badan usaha yang bergerak pada sektor perbankan memiliki peranan dalam menunjang perekonomian di Provinsi Lampung dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk pelayanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kepemilikan Bank Pembangunan Daerah Lampung Sebagian besar saham nya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, mengenai pentingnya peran sektor perbankan, Pemerintah menetapkan suatu ketentuan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengharuskan pengelolaan bank umum dikelola atas dasar dari pelaksanaan prinsip GCG.

Penerapan tata kelola perusahaan pada organ perusahaan Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan, melindungi kepentingan, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nilai-nilai etika bisnis yang berlaku dalam sektor perbankan.

Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi saat ini Bank Pembangunan Daerah Lampung berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan dan menciptakan persaingan kompetitor yang berdaya saing unggul dengan mengeluarkan produk-produk pelayanan berbasis digitalisasi untuk memudahkan dan membantu *stakeholder* dalam melakukan transaksi non tunai. Salah satu pengembangan aplikasi yang saat ini sedang terus dilakukan penyempurnaan

adalah aplikasi pelayanan Pemerintah Daerah Online (Pemda Online) yang merupakan produk pelayanan berbasis digitalisasi perbankan yang mendukung layanan transaksi gerakan non tunai.

Penerapan dari pelaksanaan pemda online tujuannya adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kas daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara dan mencegah transaksi illegal seperti meminimalisir adanya penyelewangan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. pelaksanaan dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) perlu dilakukan penyesuaian dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI).

Bank Pembangunan Daerah Lampung berupaya untuk terus meningkatkan kualitas teknologi informasi yang dimiliki agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah dan stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, Bank Pembangunan Daerah Lampung senantiasa melakukan inovasi dan melakukan pengembangan TI secara berkelanjutan seiring dengan perencanaan pengembangan dan perluasan jaringan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum (2016 :2) yang menjelaskan transformasi digitalisasi perbankan adalah merupakan bagian dari pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang tidak terpisahkan dalam mendukung kegiatan operasional Bank. Mengingat bank merupakan sektor vital dalam kegiatan jasa perbankan, maka pengelolaan tata kelola perusahaan perlu dilandasi dengan produk pelayanan digitalisasi sebagai kemudahan akses di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Pelayanan digitalisasi perbankan telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.3/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital yang menyampaikan bahwa dalam persaingan di industri jasa keuangan semakin tinggi, sehingga mendorong bank umum untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan berbasis digitalisasi.

Berdasarkan aturan POJK No. 12/POJK.3/2018 tentang pelaksanaan digitalisasi perbankan mengungkapkan

bahwa salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank adalah dengan melakukan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal untuk mendukung inovasi layanan bank. Dalam hal ini, bank perlu memberikan kemudahan dalam akses pelayanan perbankan berbasis teknologi informasi tanpa batasan tempat dan waktu untuk mendorong pengelolaan keuangan nasabah dan daerah yang lebih baik. Inovasi layanan dan penyelerasan strategi dalam penggunaan teknologi informasi mendorong industri perbankan untuk memasuki layanan perbankan digital.

## V. PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil skripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam mendukung transformasi digitalisasi perbankan studi pada aplikasi pelayanan "pemda online" Bank Pembangunan Daerah Lampung, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

#### 1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Lampung

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip pelaksanaan GCG akan tetapi belum dilaksanakan secara baik karena masih ada beberapa hasil penelitian tata kelola perusahaan yang belum menunjukkan hasil yang optimal, Hal ini ditunjukkan melalui hasil penilaian tata kelola perusahaan yang menunjukkan pada tahun 2018 sampai dengan pada tahun 2019 tingkat komposit Bank Pembangunan Daerah Lampung cenderung menunjukkan hasil yang tetap dengan berada pada tingkat III "Cukup Baik". salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penelitian tersebut ada pada aspek struktur kepengurusan bank yang belum terpenuhi dan hal tersebut berpengaruh terhadap rencana strategis yang dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung karena

manajemen operasional perusahaan yang dijalankan belum dilaksanakan secara efektif.

## 2. Indikasi *Good Corporate Governance* Dalam Mendukung Transformasi Digitalisasi Perbankan

### a. Transparansi

Pelaksanaan prinsip transparansi pada Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah terlaksana secara baik ditandai dengan adanya pengelolaan website sebagai bentuk perwujudan sikap transparansi dalam memperoleh segala bentuk perwujudan sikap transparansi dalam memperoleh segala bentuk informasi terkait kondisi internal perusahaan dan informasi mengenai kerjasama yang dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung yang diperuntukkan kepada para *stakeholder* dan masyarakat. Perwujudan lain dalam pelaksanaan transparansi ditunjukkan melalui pengambilan suatu keputusan yang didasarkan oleh sikap keterbukaan dengan menyelenggarakan RUPPS dalam membahas dan menindaklanjuti keputusan yang akan diambil oleh perusahaan.

### b. Akuntabilitas

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah terlaksana secara baik ditandai dengan adanya Pengelolaan perusahaan yang didasari atas kejelasan tentang struktur, tugas, tanggung jawab dan peran yang dilaksanakan oleh unit kerja di PT Bank Daerah Lampung kepada para *stakeholder*. dan bertanggung jawab dalam memberikan laporan kinerja perusahaan dan kondisi keuangan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga yang berwenang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan, Hal ini telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

### c. Responsibilitas.

Pelaksanaan prinsip responsibilitas pada Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah terlaksana secara baik ditandai dengan adanya pengelolaan perusahaan yang didasari atas pelaksanaan tanggung jawab

sosial yang berkesinambungan kepada masyarakat dan melandasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.

### d. Kemandirian

Pelaksanaan prinsip kemandirian pada Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah terlaksana secara baik ditandai dengan adanya pengelolaan perusahaan yang didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK/03/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam menempati komposisi jabatan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan, kepengurusan dan kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah Lampung. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ditunjukkan bahwa Bank Pembangunan Daerah Lampung pada tahun 2018 - 2019 tidak memiliki kasus yang mengarah pada adanya benturan kepentingan terhadap pengelolaan perusahaan.

### e. Kesetaraan

Pelaksanaan prinsip kesetaraan pada Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah terlaksana secara baik ditandai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada para *stakeholder* dalam menerima informasi terkait dengan kondisi internal perusahaan, seperti laporan kinerja, tata kelola perusahaan dan laporan keuangan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan memberikan kesempatan yang sama pada semua karyawan dalam pengembangan kompetensi diri, kenaikan jabatan dan penerimaan karyawan yang tidak membedakan nya atas ras, suku, agama, golongan, gender dan kondisi fisik

Berdasarkan pada penerapan kelima prinsip GCG, Bank Pembangunan Daerah Lampung mengembangkan suatu inovasi pelayanan berbasis digitalisasi perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk upaya dalam mempertanggungjawabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kas daerah dengan aplikasi pemda online.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Pemenuhan komposisi jabatan inti Bank Pembangunan Daerah Lampung perlu segera dilakukan untuk memperbaiki sistem kinerja operasional perusahaan yang tidak berjalan secara efektif dikarenakan terdapat beberapa komposisi jabatan inti yang lowong sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, Oleh karena itu pemenuhan komposisi jabatan inti perlu segera untuk dilakukan agar masing - masing sub unit kerja dalam menjalankan peran dan tugas nya sesuai dengan tupoksi nya masing - masing.
2. Mencari dan menemukan sosok kepemimpinan yang professional dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab nya sebagai seseorang pemimpin untuk menciptakan tata kelola perusahaan Bank Pembangunan Daerah Lampung yang lebih baik lagi kedepannya.
3. Pelaksanaan dari prinsip GCG perlu untuk terus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Lampung agar fungsi dari penerapan GCG dalam melindungi kepentingan *stakeholder* dapat berjalan secara berkepanjangan dan menumbuhkan citra positif perusahaan yang lebih baik lagi.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung kegiatan operasional bank dan kegiatan bisnis.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fitri, Intan Meutia dan Devi Yulianti (2019). Manajemen BUMN. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

- Moleong, Lexy. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Pasolong, Harbani. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung ; Alfabeta
- Lampung, BPD. (2018). Laporan Tahunan (Annual Report) Meningkatkan Layanan Berbasis Teknologi. Bandar Lampung: PT Bank Lampung.
- Rusdianto. Susetyorini, Umi Elan. (2019). Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya. Bandung: PT Refika Aditama
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance & Good Corporate Governance. Bandung: Team Mandar Maju
- Sumanjoyo, Simon dan Dedy Hermawan (2018). Membangun Inovasi Daerah Yogyakarta : CV Budi Utama
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sutedi, Adrian. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika
- Tresiana, N. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Thoha, Miftah. (2012). Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal dan Skripsi

- Christian, Chandra. (2016). Implementasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada RS Surabaya. Surabaya, Universitas Kristen Petra.
- Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2019). Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Tranparency Through Open Data Jakarta in Provincial Government. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 1-10.
- Febrianto, Danang. (2013). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Empiris Pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2012 Jakarta), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

- Pratiwi, Fernanda., Anantasia, E., & Purwanto, N. (2014). Analisis Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Pada BEI, Malang). Universitas Kanjuruhan: Jurnal Ekonomi .
- Suwandi, Imam., Ria, A., Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Bandung : Universitas Padjajaran
- Windi, T Kadek., Devi, S., Ratnadi. (2018). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kualitas Informasi Keuangan PDAM Kabupaten Buleleng. Universitas Udayana.
- Prasantio, B. F. M., & Endang (2018). Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia Cabang II Palembang). Malang : Universitas Brawijaya
- Wahyu, Shinta., & Arumrasmi., M. (2017). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai di Politeknik Negeri Batam : Politeknik Negeri Batam.
- Cantika, Sehssa., Rostyaningsih, D., Djumiarti, T. (2014). Analisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pertahanan : Kota Semarang.
- Setiwan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Banten : Universitas Pendidikan Indonesia
- Saputra, J. H. (2014). Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan. Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan, 12.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan, 18(2), 12.
- Wuri, N. (2016). Peranan Lembaga Punyimbang Adat Lampung Saibatin. Peranan Lembaga Punyimbang Adat Lampung Saibatin, 75.
- Saputra, Juanda Hadi. (2014). Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang, 12.

### Sumber Lain

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Jakarta.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Good Corporate Governance (GCG)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMN).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK/3/2018 Tentang Pelaksanaan Digitalisasi Perbankan.
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara.
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Negara